



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024



Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Flores Timur Tahun 2025



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang maha Kuasa atas berkat dan bimbingan-Nya, dalam tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Praturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur tahun 2024, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu, kami berharap dengan penyampaian RLPPD ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menaungi kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur .

Larantuka, 26 Maret 2025



ANTONIUS DONI DIHEN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur tahun 2024. RLPPD Kabupaten Flores Timur disusun oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai informasi kepada masyarakat atas kinerja perangkat daerah di Kabupaten Flores Timur. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan. Dan RLPPD dapat kami sampaikan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA MAKRO

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah secara umum. Capaian makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia;
- b. Angka Kemiskinan;
- c. Angka Pengangguran;
- d. Pertumbuhan Ekonomi;
- e. Pendapatan Per-Kapita; dan
- f. Ketimpangan Pendapatan atau Gini Rasio.

Capaian kinerja makro Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	IKK	Capaian kinerja 2023	Capaian kinerja 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,24	69,79	0,55 %
2	Angka Kemiskinan	11,77	11,25	0,52 %
3	Angka Pengangguran Terbuka	3,79	3,58	0,21 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,18	2,69	0.49 %
5	Pendapatan Per-Kapita	6.081.306.9	6.445.520.6	-0.3642137
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator untuk mengukur kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah atau IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir;
- Pengetahuan (*Knowledge*), diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah;
- Standar hidup layak (*decent standard of living*), diwakili oleh PNB per kapita.



Peningkatan IPM tahun 2024 didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Indikator Pembentuk IPM

3 Dimensi	Pendekatan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat lahir (Thn)	72,81	72,92	73,23	73,57	73,91
	Harapan Lama Sekolah (Thn)	12,91	12,92	12,94	12,95	12,96
Pengetahuan	Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	7,71	7,72	7,79	8,04	8,06
	Pendapatan Nasional Bruto per Kapita (Ribu Rp)	7.631	7.578	7.918	8.223	8.505

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur

b. Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Angka Kemiskinan Makro, yang diperoleh dari kegiatan pendataan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maret dan September.

Angka Kemiskinan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Garis Kemiskinan (Rp)
2010	22.40	9.61	166,416
2011	21.63	9.06	185,817
2012	21.90	9.12	207,480
2013	19.60	9.06	214,010
2014	19.21	7.83	222,207
2015	24.02	9.66	226,252
2016	25.65	10.31	246,851
2017	26.97	10.75	267,317
2018	21.99	11.05	281,757
2019	27.83	10.90	279,268
2020	27.89	10.84	301,611
2021	28.90	11.14	329,340
2022	28.08	10.75	364,117
2023	30.93	11.77	405,486
2024	29.74	11.25	412,744

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur

Tingkat Kemiskinan atau persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi masyarakat yang pengeluarannya dibawah Garis Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 adalah 11,25 % menurun 0,52 poin dari Tahun 2023 yang sebesar 11,77 %. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ada perbaikan meskipun angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan Tingkat Kemiskinan pada

Tahun 2023 merupakan angka kemiskinan yang tertinggi sepanjang 15 tahun di Kabupaten Flores Timur.

c. Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Pengangguran terbuka dapat menjadi masalah dalam perekonomian karena dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Angka ini diperoleh dari kegiatan Pendataan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus tahun berjalan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020 s/d 2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	3.96	1.74	2.98	3.52	3.21
Sumba Timur	3.49	3.35	2.61	2.21	3.46
Kupang	4.90	3.99	3.23	3.22	3.36
Timor Tengah Selatan	2.63	2.57	1.99	2.64	2.36
Timor Tengah Utara	4.26	3.88	3.51	1.96	1.82
Belu	7.42	5.35	6.00	5.45	5.41
Alor	3.11	2.59	2.27	2.52	2.27
Lembata	4.88	4.94	4.74	2.55	2.18
Flores Timur	3.16	3.81	3.49	3.79	3.58
Sikka	4.00	4.54	4.51	2.62	2.33
Ende	2.95	2.61	2.06	2.59	2.05

Ngada	4.69	2.99	2.81	4.00	2.68
Manggarai	4.09	3.70	3.50	2.44	1.17
Rote Ndao	4.90	3.67	3.64	3.65	2.42
Manggarai Barat	3.72	4.94	4.91	4.42	3.47
Sumba Tengah	4.02	1.45	1.21	1.89	1.89
Sumba Barat Daya	2.36	2.04	1.97	2.08	2.64
Nagekeo	3.09	0.97	2.97	3.54	2.17
Manggari Timur	2.10	1.96	1.89	1.63	0.51
Sabu Raijua	3.08	1.25	3.29	4.06	3.99
Malaka	3.63	3.43	3.30	3.06	1.58
Kota Kupang	10.90	9.76	8.55	5.69	8.6
Nusa Tenggara Timur	4.28	3.77	3.54	3.14	3.02

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 (data Sakernas) mengalami penurunan sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan tahun 2023, namun lebih tinggi dibandingkan dengan angka NTT.

Tabel

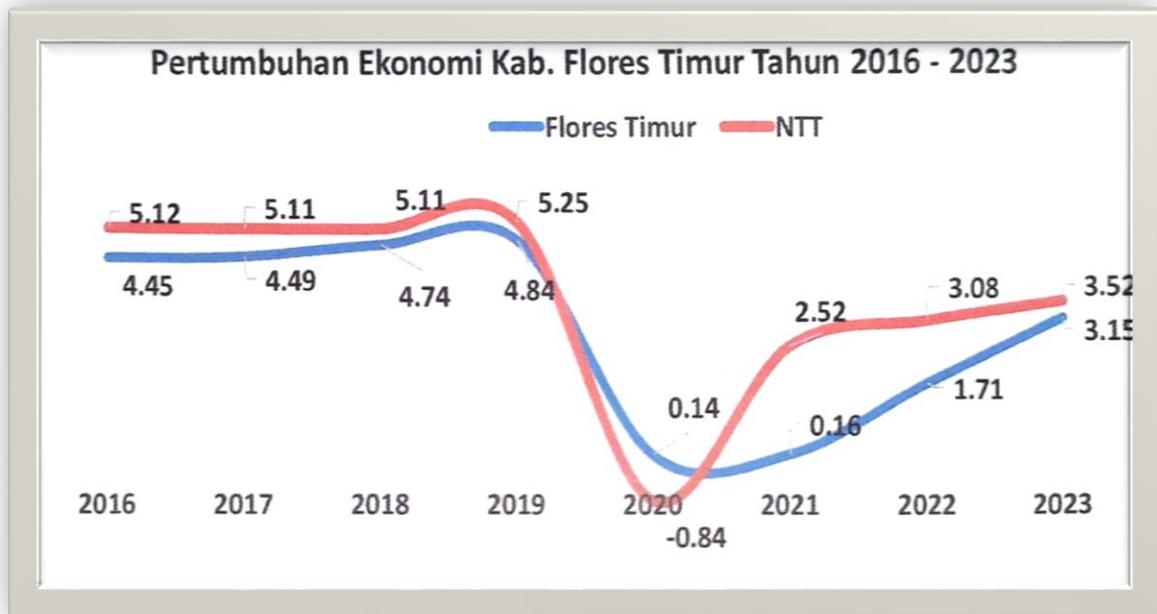
Tingkat Pengangguran Terbuka se-Daratan Flores Timur 2022-2023

Kab. Se-Daratan Flores	2022	2023	2024
Manggarai Timur	1.89	1.63	0.51
Manggarai	3.50	2.44	1.17
Ende	2.06	2.59	2.05
Nagekeo	2.97	3.54	2.17
Lembata	4.74	2.55	2.18
Sikka	4.51	2.62	2.33
Ngada	2.81	4.00	2.68
Manggarai Barat	4.91	4.42	3.47
Flores Timur	3.49	3.79	3.58

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur

Jika dibandingkan dengan Kabupaten se-Daratan Flores, Flores Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka paling tinggi, se-kabupaten di daratan Flores dan Lembata.

d. Pertumbuhan Ekonomi



Sebelum Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur di kisaran 4-5 %, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi propinsi. Di tahun pandemi, pertumbuhan ekonomi dan nasional bernilai negatif sedangkan Flores Timur dan beberapa wilayah lainnya di NTT yang kontribusi sektor utamanya dari sektor primer masih tetap tumbuh meskipun melambat. Untuk tahun 2023 di angka 3,18 dan mengalami penurunan di tahun 2024 di angka 2,69.

e. Pendapatan per-Kapita

Pendapatan per-Kapita merupakan ukuran pendapatan rata-rat per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Endapatan per-Kapita dihitung dengan membagi total pendapatan negara (PDRB) dengan jumlah penduduknya, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
PDRB dan PBRB per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB	Juuta Rupiah	5,246,068,6	5,269,530,2	5,380,269,4	5,643,376,2	6,062,050,8
PDRB per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	20,496,2	19,110,4	19,216,48	19,862,51	21,026,16
PDRB ADHK	Juta Rupiah	3,493,517,2	3,498,470,7	3,522,549,5	3,582,897,3	3,695,629,3
PDRB per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	13,649,06	12,687,48	12,581,34	12,610,42	12,818,25

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur

PDRB per Kapita Kabupaten Flores Timu, baik untuk Harga yang Berlaku dan Hargag Konstan mengalami penurunan saat pandemi Covid-19 dan naik perlahan-lahan seiring dengan meningkatnya pertumbuhn ekonomi. Untuk Pendapatan per Kapita Tahun 2024 di angka 6.445.520.6.

f. Ketimpangan Pendapatan/ Ratio Gini

Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan di suatu daerah diperoleh dari angka Gini Ratio. Gini Ratio digunakan untuk mengukur adanya ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi.

Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari “0” (0%) sampai “1” (100%). Nilai “0” menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai “1” menggambarkan ketidak sempurnaan. Artinya, bila sebuah daerah mempunyai gini ratio bernilao 0, maka distribusi pendapatan

penduduk yang ada dalam daerah tersebut telah merata. Sebaliknya, bila gini ratio pada sebuah negara adalah “1”, maka distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk yang terdapat dalam daerah tersebut tidak terjadi secara merata. Artinya, telah terjadi ketimpangan kekayaan atau pendapatan yang sangat nyata.

Data terakhir Tahun 2023 menunjukkan bahwa Gini Ratio Kabupaten Flores Timur menurun sebanyak 0,007 point, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Ketimpangan Pendapatan

Kabupaten	2020	2021	2022	2023
Flores Timur	0.3170	0.2950	0.2940	0.2870

Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,52 poin dalam satu tahun bisa dihasilkan dari sinergi beberapa faktor di atas, terutama disebabkan pemerintah berhasil mengimplementasikan program bantuan sosial secara merata, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. Namun, untuk memastikan penurunan yang berkelanjutan, diperlukan pemantauan, evaluasi program, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Faktor-faktor ini, jika dikombinasikan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan di daerah dan menunjukkan perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat.

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan yakni urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan urusan Sosial.

1. URUSAN PENDIDIKAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan 4 (empat) indikator yang dinilai yakni:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87,60 %	85,72%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,60 %	910,59 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	79,18 %	68,26 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85,71 %	22,79 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi anggaran untuk membiayai Urusan Pendidikan dalam mendukung indikator sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dengan capaian realisasi sebesar Rp. 46.411.111.372,- dari target Rp. 62.749.438.763,- atau sebesar 73,97 %.

1. Program :

Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.778.187.435,- dari target anggaran Rp.3.428.695.250,- atau 81,03 %.

Kegiatan:

- Pemenuhan layanan dasar SPM PAUD;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.

- Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan;

Sub Kegiatan :

- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.
- Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD);

Sub Kegiatan :

- Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD);

Sub Kegiatan :

- Peningkatan kualitas dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

2. Program :

SPM Pendidikan Dasar

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.43.605.144.937,- dari target anggaran Rp.59.270.748.163,- atau 73,57 %.

Kegiatan :

- Pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023533.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.
- Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Disik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534.

Sub Kegiatan :

- Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut;
- Pelatihan/Seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B);

Sub Kegiatan :

- Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.
- Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B).

Sub Kegiatan :

- Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B);

Sub Kegiatan :

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

3. Program:

Pendidikan Kesetaraan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.27.779.000,- dari target anggaran Rp.49.995.350,- atau 55,56 %.

Kegiatan:

- Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan).

Sub Kegiatan :

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan menemukan beberapa masalah yakni :

- a. Verifikasi dan validasi data anaka tidak sekolah belum terlaksana dengan baik, sehingga data base kependudukan yang terintegrasi dengan data Pendidikan belum tersedia.
- b. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen PNS yang menangani urusan pendidikan .

2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,48 %	0,53 %
2	Prosentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	100 %
3	Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,92 %	89,64 %
4	Prosentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,76 %	99,55 %
5	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,51 %	68,12 %
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,84 %	96,16 %
7	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62,70 %	57,03 %
8	Prosentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,98 %	39,77 %

9	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71,77 %	66,80 %
10	Prosentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66,31 %	76,60 %
11	Prosentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	79,20 %
12	Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,81 %	100 %
13	Prosentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	53,62 %
14	Prosentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	89 %	91,15 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan untuk 5 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebesar Rp.216.422.795.355.- dari target sebesar Rp.225.884.002.130,- atau sebesar 95,8 %, dan pada 21 Puskesmas realisasi anggaran yang pada masing-masing puskesmas memiliki 1 Program, 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan sebesar Rp. 28.292.745.820,- dari target Rp. 34.999.808.730,- atau sebesar 80,83 % dengan program/kegiatan sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan

1. Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.104.342.295.933,- dari target anggaran Rp.107.530.669.304,- .

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program:

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.104.851.081.384,- dari target anggaran Rp.109.266.103.900,- .

Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

3. Program:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.6.689.091.598,- dari target anggaran Rp.8.384.671.186,- .

Kegiatan :

- Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program:

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.400.097.280,- dari target anggaran Rp.443.992.740,- .

Kegiatan :

- Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

5. Program:

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.130.300.000,- dari target anggaran Rp.185.632.000,- .

Kegiatan :

- Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah.

• Puskesmas

1. Program :

Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.28.292.745.820,- dari target anggaran Rp.34.999.808.730,- .

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada halaman berikut:

No	Indikaator	Hambatan
1	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Pendataan bumil yang belum maksimal 2. Kurangnya Informasi masyarakat terkait pelayanan Antenatal 3. Akses ke Fasyankes yang sulit
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Ibu bersalin mendapat pelayanan bukan oleh nakes dana tau tidak di fasyankes 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Kendala biaya 4. Social budaya
	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Social budaya
	4. Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Social Budaya
	5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui
	6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui 2. Kurangnya informasi tentang pelayanan ini 1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui 2. Kurang Informasi tentang kegiatan ini

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	0 %	0 %
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	0 %	0 %

	infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota		
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	31,50 %	92,20 %
4	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	49,32 %	58,13 %
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	20,80 %	6,62 %
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	31,41 %	100 %
7	Tingkat Kemantapan jalan Kab/Kota	73,59 %	50,15 %
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	0 %
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi anggaran untuk membiayai 6 Program, 15 Kegiatan. 46 Sub Kegiatan dalam mendukung indikator sasaran kinerja terwujudnya daya saing infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.62.119.726.782,- dari target Rp. 57.990.901.318,- atau sebesar 93,35 % dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program:

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , Kabupaten/Kota.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.4.277.769.901,- dari target anggaran Rp.4.480.055.098,- .

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program:

Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.163.446.773,- dari target anggaran Rp.2.898.415.990,- .

Kegiatan :

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program:

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.9.744.853.398,- dari target anggaran Rp.12.315.426.549,- .

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program:

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.8.248.532.730,- dari target anggaran Rp.8.277.696.580,- .

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program:

Penyelenggaraan Jalan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.32.786.352.295,- dari target anggaran Rp.33.264.838.490,- .

6. Program:

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.721.303.834,- dari target anggaran Rp.833.294.625,- .

Kegiatan :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RencanaRinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam mengakomodir banyaknya usulan daripada masyarakat.
2. Masih kurangnya data pendukung yang dimiliki.
3. Belum adanya kajian teknis secara komprehensif dengan sektor terkait lainnya untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
4. Masih adanya kendala dalam proses pelelangan Paket Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengalami keterlambatan bahkan tidak terlaksananya Paket Kegiatan tersebut.
5. Sumber Daya Manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum yang masih harus dibekali Pendidikan dan Latihan (*DIKLAT*) guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

6. Masih adanya aset Dinas yang berada di tangan pegawai yang telah pindah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur ke Instansi lain yang dibawa serta.
7. Masih rendah kesadaran tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
8. Pegawai masih kurangnya menguasai pembagian uraian tugasnya.
9. Masih kurangnya efisien dan efektif dalam pelaksanaan proses tugas.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	0 %	17,03 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	0 %	0 %
3	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	0 %	0 %
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	36 %	52,30 %
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana,sarana dan Utilitas umum)	0,040 %	0 %

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi anggaran untuk membiayai 4 Program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebesar Rp.4.460.258.060 '- dari target Rp.4.655.151.525- atau sebesar 95, 81 % dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.500.595.860,- dari target anggaran Rp.2.652.851.735,- .

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program :

Kawasan Permukiman

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.921.146.000,- dari target anggaran Rp.1.942.299.860,- .

Kegiatan:

- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha

3. Program :

Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan:

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

4. Program :

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.18.748.000,- dari target anggaran Rp.19.999.930,- .

Kegiatan:

- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program :

Retribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.19.768.200,- dari target anggaran Rp.20.000.000,-

Kegiatan:

- Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Secara umum, dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya indikator pelayanan Dasar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dapat dilaksanakan dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Renstra SKPD belum sepenuhnya memuat program dan kegiatan yang berdasarkan Program kegiatan SPM, Ada beberapa program kegiatan SPM secara pelaporan ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetapi pelaksanaannya ada di Dinas atau Instansi lain.

- b. Kebutuhan masyarakat lebih tinggi ketimbang ketersediaan dana APBD.
- c. Ada dua OPD yang menjalankan fungsi yang sama yaitu pengurusan aset tanah.

5. URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %
2	Prosentase perda dan perkara yang ditegakan	0%	100 %
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	79,71 %
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagan terhadap bencana	100 %	74,10 %
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25 orang	0,45 %
6	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90 %	85,71 %
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,8 menit	17,50 menit

B. Realisasi Belanja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Trantibumlinmas dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yakni :

a. Satuan Polisi Pamong Praja, dan

Realisasi anggaran untuk membiayai 3 Program, 10 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut

Rp.5.088.824.317'- dari target Rp. 5.241.320.664- atau sebesar 97,09% , dengan Program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.707.425.317,- dari target anggaran Rp.3.833.391.441,-

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.299.459.000,- dari target anggaran Rp.1.323.477.723,-

Kegiatan:

- Penanganan Gangguan Kantrantibum
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

3. Program

Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.81.940.000,- dari target anggaran Rp.84.451.500,-

Kegiatan:

- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi anggaran untuk membiayai 2 Program,12 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan dalam mendukung indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar Rp.4.003.286.586'-dari target Rp.3.591.125.511- atau sebesar 89.70% .

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.045.286.162,- dari target anggaran Rp.3.219.802.746,-

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program :

Penanggulangan Bencana

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.545.839.349,- dari target anggaran Rp.783.483.840,-

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korvban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diantaranya adalah :

- (1) Kurang adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan peraturan – peraturan lainnya;
- (2) Jumlah Anggota Pol.PP yang sudah mengikuti Diklat PPNS sangat rendah;
- (3) Masih minimnya Jumlah Satuan Linmas yang terlatih;
- (4) Masih Minimnya Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih;
- (5) Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran masih Minim.

b. Badan penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur , antara lain:

- (1) Belum adanya Pemangkuan Anggaran untuk pengambilan data pada daerah rawan bencana serta jumlah warga negara by.Name,by Adres Pada Lokasi Rawan Bencana
- (2) Fasilitas penunjang dalam penyampaian informasi masih sangat kurang (Papan Informasi serta Jalur Evakuasi dan Titik kumpul) pada daerah rawan bencana
- (3) SDM dalam mendukung pencapaian SPM masih sangat kurang
- (4) Belum adanya SOP yang baku dalam penanggulangan bencana kedaruratan
- (5) Format pendataan,perhitungan kebutuhan,perencanaan dan pelaksanaan yang mendukung SPM berdasarkan

Permendagri 59 Tahun 2021 Belum Bisa dilengkapi secara baik.

- (6) Pengembangan sumber daya aparatur dalam misi penanggulangan bencana masih sangat minim.
- (7) Masih banyak kegiatan yang mendukung SPM tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

6. URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	16,63 %	75,33 %
2	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100 %	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi anggaran untuk membiayai 7 Program, 17 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah Rp.5.105.631.612 '- dari target Rp. 5.252.458.419- atau sebesar 97,20%- dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.377.585.373,- dari target anggaran Rp.3.486.451.041,-

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program :

Pemberdayaan Sosial

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.117.046.239,- dari target anggaran Rp.117.999.790,-

Kegiatan :

- Penembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3. Program

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Dengan capaian realisasi sebesar Rp.94.257.200,- dari target anggaran Rp.100.499.360,-

Kegiatan:

Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. Program

Rehabilitas Sosial

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.601.202.491,- dari target anggaran Rp.603.495.880,-

Kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HI/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

5. Program

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.280.543.100,- dari target anggaran Rp.303.440.698,-.

Kegiatan:

- Pemeliharaan Anak-anaka Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program

Penanganan Bencana

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.604.799.140,- dari target anggaran Rp.610.571.150,-.

Kegiatan:

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

7. Program

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dengan capaian realisasi sebesar Rp.29.926.000,- dari target anggaran Rp.30.000.000,-

Kegiatan:

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Sosial Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS belum dilakukan secara maksimal;
2. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dan penanganan PMKS;
3. Ketersediaan SDM penggerak yang terbatas;
4. Sarana dan prasarana penunjang masih sangat terbatas;
5. Koordinasi lintas sektor baik dinas maupun aparat desa dan masyarakat belum berjalan dengan baik.

2. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. Hasil EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022, Kabupaten Flores Timur mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2.1217 dengan status kinerja Rendah sedangkan untuk hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, tahun pelaporan di Tahun 2024, belum dikeluarkan hasil Evaluasinya dari Kementerian Dalam Negeri.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Nomor: 189.A/LHP/XIX.KUP/06/2023 Kabupaten Flores Timur berhasil mendapatkan Opini WAJAR Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 yang berarti Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Audited/Unaudited) Realisasi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mencapai sebesar Rp.1.289.495.884.462,48,- atau (99,72 %) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mencapai Rp.1.306.406.367.284,00,- (94,47%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	55.299.582.639,00	55.232.436.304,89	99,88
2	Pendapatan Transfer	1.222.927.550.127,41	1.221.629.776.567,00	99,89
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.884.450.511,00	12.633.671.590,59	84,88

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Operasi	916.107.571.223,00	850.427.649.170,00	92,83
2	Belanja Modal	203.897.389.578,00	189.895.700.799,00	93,13
3	Belanja Tidak Terduga	5.534.950.980,00	2.423.055.403,00	43,78
4	Belanja Transfer	257.393.941.760,00	263.659.961.912,00	102,43

4. INOVASI DAN PENGHARGAAN DAERAH

1. INOVASI DAERAH

Pembangunan di era globalisasi mengedepankan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Percepatan pembangunan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif dan efisien serta didukung dengan kreativitas dan inovasi. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa tujuan inovasi daerah adalah peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. Inovasi Daerah menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan produktivitas untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan daya saing daerah di tahun 2023. Selain itu, inovasi daerah juga menjadi sarana untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berikut beberapa inovasi daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tahun 2023, yakni sebagai berikut:

1. Go Cinta 2H2

Inovasi Go Cinta 2H2 merupakan upaya perpaduan inovasi yang telah digagas sebelumnya yakni *Gerobak Cinta* dan *2H2 Center*. Pengembangan inovasi dengan mengedepankan aspek pemberdayaan dan kemandirian keluarga serta melibatkan semua *stakeholders* untuk mengatasi *Stunting* serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Gerobak cinta yang dimaksudkan adalah gerobak yang berisikan makanan bergizi untuk mencukupi nutrisi anak dengan memanfaatkan potensi makanan lokal, yang selanjutnya didorong dengan penuh cinta kasih secara khusus oleh keluarga dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan generasi Flores Timur yang sehat, cerdas dan produktif.

2. BAPEDA (Bapak Peduli Anak)

Inovasi yang menggagas peningkatan peran Bapak/Ayah dalam mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui kerja sama keluarga (Bapak dan Mama), tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka *stunting* dan angka gizi kurang bagi Balita.

3. Teras Baca

Teras baca merupakan komunitas bersama untuk menyiapkan tempat belajar dan bermain bagi anak-anak PAUD dan siswa-siswi SD/SMP/SMA diluar jam sekolah. Inovasi digagas dengan konsep pemberdayaan yang melibatkan kaum muda, para guru, tenaga kesehatan, orang tua dan pemerintah untuk memberikan edukasi seperti budaya literasi, kesehatan, lingkungan, sosial dan toleransi.

4. NONA SARI SETIA (No Nasi Satu Hari, Sehat Bahagia dan Aman)

Dalam menghadapi masalah inflasi (naiknya harga barang) Flores Timur, Pemerintah menggagas inovasi Nona Sari Setia yakni gerakan sehari tanpa nasi pada setiap hari Jumat untuk mengganti pangan di rumah jangan menggunakan nasi. Hal ini merupakan langkah konkret untuk menekan tingkat

ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi nasi (beras). Masyarakat dapat memanfaatkan pangan lokal lain (seperti singkong, pisang, jagung dan sorgum) yang diolah untuk dikonsumsi sebagai pengganti nasi/beras.

5. KRIS BEL (Kelurahan Wisata Balela)

Kolaborasi antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi pariwisata dalam wilayah kelurahan yakni taman kota Felix Fernandez dan Pante Uste, yang tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Destinasi wisata tersebut dikelola secara baik oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sebagian besar dari kaum millennial, yang didukung dengan program-program pemberdayaan dan pembangunan pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dengan demikian, potensi daerah (pariwisata) tersebut dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan dengan pola pemberdayaan yang memberi ruang terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain mengembangkan beberapa inovasi di atas, Pemerintah Daerah juga berupaya menumbuhkan budaya inovasi pada seluruh elemen masyarakat, melalui kegiatan lomba inovasi daerah dalam bidang pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan. Beberapa inovasi terbaik tahun 2023 yang memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Inovasi KB Mobile

Inovasi KB Mobile merupakan upaya pendekatan yang dilakukan oleh para Bidan secara langsung kepada masyarakat khususnya pada Pasangan Usia Subur (PUS). Inovasi ini digagas oleh Puskesmas Nagi dengan tujuan untuk meningkatkan prevalensi peserta KB modern, meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) MKJP serta mampu menurunkan angka *Unmet*

need (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) di wilayah Kecamatan Larantuka.

2. SINKOR (Simpul Kreasi Nusantara)

SINKRON bergerak dalam bidang pendidikan, literasi, budaya, wisata, kepemudaan dan digitalisasi. Inovasi yang digagas dari komunitas pemerhati Pendidikan di kecamatan Larantuka, yang memiliki konsep bahwa dalam pengembangan pendidikan melalui pelaksanaan program perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak sehingga terciptanya ruang untuk berbagi gagasan dan karya, *networking* dan pembelajaran dan pengembangan keterampilan sosial.

3. Pasar Barter

Konsep inovasi yang digagas oleh kelompok perempuan kepala keluarga (Pekka) Lodan Doe yang berpusat di Kecamatan Kelubagolit, dengan menghidupkan kembali pasar barter di setiap desa wilayah kerja kelompok. Melalui budaya komunikasi Lamaholot, negosiasi dan toleransi antar anggota serikat Pekka dan memanfaatkan hasil produksi pertanian dan pengolahan sumber daya lokal anggota, diharapkan dapat membantu anggota serikat Pekka dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Revolusi Pertanian

Pemerintah Desa Gekeng Deran (Kecamatan Tanjung Bunga) bersama masyarakat berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki (jagung, mete, kacang tanah dan kelapa), dengan tujuan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi masyarakat. Upaya revolusi pertanian dilakukan dengan (1) menggairakan Kembali Semangat Bertani bagi Masyarakat; (2) membangun konsep pertanian secara *cluster* (bersifat kawasan); dan (3) meningkatkan akses pasar yang berkelanjutan.

5. Brand Si A'O

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, kelompok UMKM orang muda di kecamatan Witihama menggagas Brand Si A'O dengan fokus pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan memperkuat jaringan pemasaran produk. Singkong dan jagung hasil pertanian diolah menjadi kripik dan jagung titi Honihama, yang selanjutnya dipasarkan/promosi dengan memanfaatkan media sosial. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada petani/masyarakat akan pentingnya meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, yang dapat berdampak pada kesejahteraan petani.

6. Madu Hutan Flores Timur

Inovasi yang dilakukan oleh Petani Madu di Desa Leraboleng (Kecamatan Titehena) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani madu. Inovasi ini dilatar belakangi karena banyaknya produksi Madu Hutan di wilayah Leraboleng dan warisan nenek moyang untuk memanjat dan memanen madu. Hampir sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani muda, namun proses panen dan penjualan yang dilakukan masih tergolong sederhana sehingga berdampak pada kualitas dan nilai jual madu hutan. Sehingga konsep inovasi yang dilakukan adalah dengan peningkatan teknik panen dan pengolahan pasca panen secara lebih profesional dan berkualitas. Pemasaran diubah dari menggunakan botol bekas menjadi motol kemasan yang dilengkapi dengan brand, dan dipasarkan melalui pendekatan langsung, pameran dan promosi melalui media online.

B. PENGHARGAAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2024 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah tingkat atas dan masyarakat. Beberapa

penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah selama tahun 2024, yakni sebagai berikut:

1. Penghargaan kategori Pengelolaan Dana Desa Terbaik Tahun Anggaran 2024.
Diberikan dalam ajang Apresiasi Pengelolaan Kinerja Pelaksana Anggaran Kementerian/Lembaga dan pengelolaan Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 Tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (melalui Gubernur) atas kinerja penurunan *stunting* Tahun Anggaran 2024. Kabupaten Flores Timur dianggap berhasil dan punya inovasi mengatasi tengkes atau stunting. Penghargaan sberupa insentif sebesar Rp.5,6 Miliar rupiah.
3. Penghargaan dalam implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5H) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Flores Flores Timur Tahun 2024. Prestasi ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut dan Kabupaten Flores Timur menjadi representasi Provinsi NTT di kancah nasional sebagai Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tingkat Provinsi.

PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Laporan ini merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Flores Timur adalah tanggung jawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Harapan kami, RLPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan daya kritis dan dukungan yang lebih besar terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam menghadapi tantangan serta permasalahan yang muncul dimasa datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua.


BUPATI FLORES TIMUR
ANTONIUS DONI DIHEN